

2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA MUNTAI

Jln R.A. Kartini No.1 Kec Muara Muntai Kab Kutai Kartanegara

RENCANA KERJA KEC. MUARA MUNTAI

TAHUN 2026

MUARA MUNTAI

Email : mmcamatoffice@yahoo.com

Kode Pos : 75562

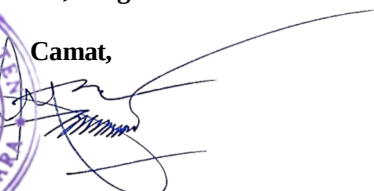
KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Muara Muntai dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

RENJA Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai Tahun 2026 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Muara Muntai untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026. Adapun keberhasilan dan tidak nya RENJA Perangkat Daerah ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada OPD Kecamatan Muara Muntai.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Muntai tahun 2026 ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Dinas Instansi lainnya serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis Kecamatan Muara Muntai dimasa yang akan datang.

Muara Muntai, Agustus 2025
Camat,


MULYADI, SE., M.Si
NIP. 197002052000121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja PD	20
2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
4.1. Program dan Kegiatan	53
BAB V PENUTUP	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra).

Kecamatan Muara Muntai dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Muntai yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Muntai. Muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur

Pemerintah dan non pemerintah, c) keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, d) berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja Kecamatan Muara Muntai mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekuensi politis antara Bupati/Wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD.

Pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan *globalMDGs*. Pendekatan ini tercermin pada a) sinergi dengan program prioritas nasional dan daerah, b) konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra Kecamatan Muara Muntai, Konsisten dengan dokumen RTRW daerah, c) penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan *bottom-up*, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD. Pada penyusunan Renja 2026 ini disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi Masyarakat,

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Muara Muntai dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- g. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
- m. Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Muara Muntai selama tahun 2026 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Muara Muntai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Penyusunan dan Pelaksanaan Renja mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan serta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kecamatan Muara Muntai adalah:

- A. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama : 1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data *base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

C. Indikator Kinerja Utama

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangcam dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase jumlah peserta musrenbang} \times 100}{100 \text{ Jumlah usulan dalam musrenbang}}$$

2. Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Kecamatan, yang bertujuan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase jumlah Layanan} \times 100}{\text{Jumlah Layanan Tepat Waktu}}$$

3. Keaktifan Siskamling yang bertujuan Untuk mengukur tingkat keamanan masyarakat dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase jumlah Kelompok Siskamling Aktif} \times 100}{\text{Jumlah keseluruhan pos siskamling}}$$

4. Tingkat Capaian Pembangunan Untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan yang menjadi kewenangan Kecamatan dengan formula;

$$\frac{\text{Prosentase volume infrastruktur yang dibangun} \times 100}{\text{Jumlah keseluruhan target pembangunan}}$$

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah



maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Kecamatan Muara Muntai Tahun 2026 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi “KUKAR IDAMAN”. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan - kebijakan perencanaan pembangunan di tahun - tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2026, Kecamatan Muara Muntai telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:



Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Muntai

Lembar: 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026)	
					Target Renja-PD tahun (2024)	Realisasi Renja-PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	76 Nilai	75 Nilai	75 Nilai		76 Nilai	76 Nilai	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75 Dokumen	25 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	25 Dokumen	25 Dokumen	0,33
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	20 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	1,00	20 Dokumen	20 Dokumen	0,80
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 Dokumen	20 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	20 Dokumen	20 Dokumen	0,80
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	50 Dokumen	15 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	15 Dokumen	15 Dokumen	0,30



7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	25 Rapat	15 Rapat	0 Rapat	0 Rapat	#DIV/0!	15 Rapat	15 Rapat	0,60
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	5 Dokumen	5 Dokumen	0,50
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Lapoaran	75 Lapoaran	75 Lapoaran	75 Lapoaran		75 Lapoaran	75 Lapoaran	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	57 Orang	54 Orang	44 Orang	44 Orang	1,00	54 Orang	54 Orang	0,95
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	1 Laporan	1 Laporan	1,00
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0!	0 Kali	0 Kali	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	8 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1,00	4 Dokumen	4 Dokumen	0,50
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,00	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00



7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	50 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	50 Laporan	25 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	1,00	25 Laporan	25 Laporan	0,50
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	25 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	
7.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengolahan Data Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan		47 Laporan	47 Laporan	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00



7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47 Stel	15 Stel	0 Stel	0 Stel	#DIV/0!	15 Stel	15 Stel	0,32
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0,00
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Peraturan	0 Peraturan	0 Peraturan	0 Peraturan	#DIV/0!	0 Peraturan	0 Peraturan	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Bimtek	0 Bimtek	0 Bimtek	0 Bimtek	#DIV/0!	0 Bimtek	0 Bimtek	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan		8 Layanan	8 Layanan	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1,00	5 Jenis	5 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	1,00	6 Jenis	6 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	6 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	6 Jenis	6 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	25 Porsi	25 Porsi	25 Porsi	1,00	25 Porsi	25 Porsi	1,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1,00	5 Jenis	5 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Exemplar	5 Exemplar	0 Exemplar	0 Exemplar	#DIV/0!	5 Exemplar	5 Exemplar	1,00



7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	5 Jenis	5 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	5 Jenis	5 Jenis	1,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Kali	15 Kali	15 Kali	15 Kali	1,00	15 Kali	15 Kali	1,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	1,00	45 Laporan	45 Laporan	1,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	1,00	150 Dokumen	150 Dokumen	1,00
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit		15 Unit	15 Unit	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	1,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	50 Unit	50 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	50 Unit	50 Unit	1,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	2 Unit	2 Unit	1,00	8 Unit	8 Unit	1,00
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	2 Unit	2 Unit	0,50



7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Matrai	1000 Matrai	1000 Matrai	1000 Matrai	1,00	1000 Matrai	1000 Matrai	1,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	336 Rekening	336 Rekening	336 Rekening	1,00	336 Rekening	336 Rekening	1,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	0 Jenis	0 Jenis	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	1,00	204 Org/Bulan	204 Org/Bulan	1,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	10 Unit	2 Unit	10 Unit	10 Unit		2 Unit	2 Unit	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	0,08
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00



7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	1 Unit	0,25
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	33 Bidang	0 Bidang	0 Bidang	0 Bidang	#DIV/0!	0 Bidang	0 Bidang	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen		100 Persen 88,5 Persen	100 Persen 88,5 Persen	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00



7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	25 Kali	25 Kali	25 Kali	25 Kali		25 Kali	25 Kali	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0!	0 Kali	0 Kali	0,00
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	3 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan		36 Kegiatan	36 Kegiatan	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 Kegiatan	29 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	1,00	29 Kegiatan	29 Kegiatan	0,81
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		95 Persen	95 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan		20 Kegiatan	20 Kegiatan	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	150 Orang	100 Orang	100 Orang	1,00	150 Orang	150 Orang	1,50



7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,00	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****)	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	25 Persen	25 Persen	25 Persen		25 Persen	25 Persen	



7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah*****)	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	10 SPM	10 SPM	10 SPM	10 SPM		10 SPM	10 SPM	
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*****)	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*****)	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00



7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		95 Persen	95 Persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	0 Desa	13 Desa	13 Desa		0 Desa	0 Desa	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00



7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,00
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Adanya Difisit Anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Adanya Kegiatan yang salah penganggaran.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan;
2. Mengurangi dan menghapus beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.
3. Melakukan penyesuaian atas salah penganggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan SKPD sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada. Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Muara Muntai, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Muara Muntai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat - surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Muntai selama kurun waktu tahun 2022 - 2025 cukup memuaskan. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Muntai, yaitu :

- a. Cakupan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
- b. Rata-rata Kinerja Kecamatan;
- c. Cakupan lembaga Masyarakat Yang Aktif;
- d. Presentase jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik;
- e. Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik;
- f. Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai, sebagai berikut:

T-C.30**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MUARA MUNTAI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Prosentase capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			75	80	85	95	75	0	85	90	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	0	100	100	
3	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	0	100	100	
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	100	100	100	100	0	100	100	
5	Persentase Peningkatan kinerja dan tata kelola kecamatan			100	100	100	100	100	0	100	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati /Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten / Kotayang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati /Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
2. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan
3. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
4. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
5. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
7. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
8. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum di wilayah kecamatan.
9. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.



Pelaksanaan penatausahaan/urusan kesekretariatan kecamatan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Muara Muntai dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya:

1. Permasalahan Internal:

- a. Kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi
- b. Belum dapat dilaksanakannya beberapa point pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat Karenabelum adanya petunjuk teknis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.

2. Permasalahan Eksternal:

- a. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
- b. Jarak antara desa-desa dan ibukota Kecamatan yang relative jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
- c. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desayang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf
2. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
4. Melakukan sosialisasi kepada aparat desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat
5. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa
6. Melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadi lokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat
8. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT.JMS yang berlokasi di desa Muara Leka dan Desa Perian, Potensi Perikanan yaitu terdapatnya Danau Jantur dan Danau Melintang yang sebagian wilayahnya adalah wilayah Kecamatan Muara Muntai.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review terhadap Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025
2. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran Tabel berikut ini

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Muntai

Lembar :

dari :

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				8.865.022.934	KECAMATAN				24.090.212.960	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	8.004.502.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Muara Muntai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai	9.989.692.960	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai		3 Laporan	155.000.000	



7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 Dokumen	7.500.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen	5 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen	8 Dokumen	10.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	5 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muara Muntai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	8 Dokumen	7.500.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	75.000.000	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	0 Dokumen	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	4 Dokumen	35.000.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Laporan	5.723.906.956	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Laporan	7.045.906.956	



7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Muntai	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	468 OB	5.635.731.014	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Muntai	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	492 OB	6.935.731.014	Gaji dan Tunjangan ASN (Pagu Anggaran berdasarkan Nilai pagu RENSTRA 2025)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 Laporan	73.175.942	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Muara Muntai	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 Laporan	85.175.942	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	28.256.100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	50 Dokumen	30.256.100	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	25 Laporan	28.256.100	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	25 Laporan	30.256.100	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Administrasi Umum Perangkat	8 Layanan	343.309.974	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Muara Muntai	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang	8 Layanan	815.000.000	



			Daerah Yang Tersedia					Tersedia			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	15.000.000	Penambahan Anggaran disebabkan adanya rencana rehabilitasi instalasi jaringan listrik Gedung Kantor Camat, BPU dan Rumah Dinas Jabatan Camat
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	55.000.000	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	50.000.000	Sebelumnya belum ada anggaran atas sub kegiatan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	20.809.974	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Porsi	100.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	10.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Kali	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Kali	85.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	45 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	400.000.000	



			SKPD								
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150 Dokumen	100.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Muara Muntai	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	640.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Muara Muntai	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	15 Unit	730.000.000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	180.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	-	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	180.000.000	Sewa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Mebel	8 Unit	60.000.000	Pengadaan Mebel	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Mebel	8 Unit	150.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Muara Muntai	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang	12 Bulan	634.029.904	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 Bulan	638.529.904	



	Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan					Pemerintahan Daerah yang disediakan			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Materai	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Materai	7.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	296.177.712	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336 Rekening	296.177.712	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 OB	334.852.192	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204 OB	334.852.192	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 Unit	560.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Muara Muntai	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 Unit	575.000.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	200.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	5 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Muara Muntai	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	5 Unit	150.000.000	



	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Lapangan		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	100.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Muntai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Unit	500.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi	Muara Muntai	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	125.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Muara Muntai	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Muara Muntai	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	12.650.000.000	
			2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	88,5 Persen				2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	88,5 Persen		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Muara Muntai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	500.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Muara Muntai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	36 Kegiatan	12.650.000.000	



7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6 Laporan	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6 Laporan	1.550.000.000	Mengakomodir Pelaksanaan : 1. HKG 2. Fasilitas HUT RI 3. Fasilitas Hari - Hari besar keagamaan 4. Keperamukaan 5. Erau 6. MTQ 7. Keolahrahaan (Bupati CUP) 8. FKUB 9. Stanting
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51 Laporan	11.100.000.000	Mengakomodir Musrenbang yang di usulkan melalui SIPD.
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Muara Muntai	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	75.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Muara Muntai	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	830.000.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Muara Muntai	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	75.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Muara Muntai	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	20 Kegiatan	830.000.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	55.000.000	



7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51 Laporan	25.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51 Laporan	775.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Muara Muntai	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Muara Muntai	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	50.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Muara Muntai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Muara Muntai	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	50.000.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Laporan	50.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Muara Muntai	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	95 Persen	285.520.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Muara Muntai	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	95 Persen	570.520.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Muara Muntai	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	285.520.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Muara Muntai	Jumlah Desa Yang difasilitasi	13 Desa	570.520.000	



7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	55.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Kegiatan	306.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	200.520.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	214.520.000	Penambahan anggaran guna mengakomodir honorarium PPTK
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	30.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Muntai	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Kegiatan	50.000.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Kecamatan Muara Muntai Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Muara Muntai dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berikut ini usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Prioritas I, Prioritas II serta Rencana Pembangunan yang pembiayaannya dilakukan melalui CSR yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2025 di Kecamatan Muara Muntai:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kec Muara Muntai

NO	PENGUSUL	NOMOR SIPD	PERMASALAHAN	ALAMAT LOKASI	REKOMENDASI PAGU (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pembangunan Pendistribusian Jaringan Pipa Air Bersih Kecamatan (Muara Muntai)								
1	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2315022	Belum Ada Jaringan Pipa Air PDAM Dari Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis Ke Paundana RT. 09 dan RT. 10 Desa Kayu Batu	Puandana RT. 09 dan RT. 10, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	Ilhamsyah Muara Aloh	ID SIPD: 1984753	Masih Kurangnya Bak Penampungan Air Bersih Yang Ada Di Desa Muara Aloh	Desa Muara Aloh, Kab. Kutai Kartanegara	215.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	H.Abdul Azis Jantur	ID SIPD: 2128198	Banyak yang belum tersedianya tandon warga	Desa Jantur, Kab. Kutai Kartanegara	215.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Pembangunan Turap Desa/Kelurahan dengan kontruksi Sederhana (Muara Muntai)								



1	ARIFADIN NUR Muara Muntai Ilir	ID SIPD: 2016272	Kondisi pinggiran sungai yang sudah abrasi - banyak rumah yang longsor di pinggir jalan - mengurangi luas lingkungan wilayah pinggir sungai - dikhawatirkan akan memakan badan jalan utama - berbahaya bagi warga masyarakat sekitar tkt terjadi longsor yang mengakibatkan korban jiwa	jalan gajah mada RT 002 Muara Muntai Ilir , Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2220466	Lanjutan Pembangunan Turap Oloy Kayu Batu	Jl. Bahrudin, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	H.Abdul Azis Jantur	ID SIPD: 2127841	Tidak Adanya Turap Mesjid yang sangat di Butuhkan Guna mencegah Longsor	Desa Jantur, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4	Abdul Hamdi Noor Tanjung Batuq Harapan	ID SIPD: 2007679	Untuk Membangun pemecah gelombang Desa	Tanjung Batuq Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
5	Danhar Jantur Baru	ID SIPD: 2311719	Lanjutan Pembangunan Turap Kubur	Jl. Kampung Baru RT. 09 Desa Jantur Baru, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
6	Ilhamsyah Muara Aloh	ID SIPD: 1977112	Tiidak Adanya Tugu/Turap Penahan Gulma Di Danau Desa Muara Aloh	Muara Aloh Di Danau , Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7	H.Abdul Azis Jantur	ID SIPD: 2128074	Tidak adanya Turap Tiang Penahan Gulma/Napung	Desa Jantur, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
8	Abdul Hamdi Noor Tanjung Batuq Harapan	ID SIPD: 2216072	Pembangunan turap untuk pemecah gelombang	TANJUNG BATUQ HARAPAN RT 001, Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan



							kepada Camat	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9	Ilhamsyah Muara Aloh	ID SIPD: 2058018	Penurapan Badan Jalan Menuju Kantor Desa	Desa Muara Aloh RT 06, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Pembersihan Rumput/Semak Belukar/Gulma, Sedimentasi Lumpur di Jalan Desa/Kelurahan (Muara Muntai)								
1	H. Arbain Jantur Selatan	ID SIPD: 2209056	Akses Jalan Kurang Memadai untuk menuju Tempat Kubah Selimau.	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.001 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2222041	Normalisasi Luah Kayu Batu	Jl. Bahrudin, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	H. Arbain Jantur Selatan	ID SIPD: 2209071	Pelebaran Halaman Kubah Selimau.	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.001, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4	H. Arbain Jantur Selatan	ID SIPD: 2349177	Surutnya jalan akses menuju kubah selimau sehingga masyarakat sulit untuk menuju kubah selimau, sehingga mohon pendalaman alur sungai	JL.RAYA RT.001 DESA JANTUR SELATAN, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Pembuatan Tempat Sampah Penampungan Sementara Kecamatan (Muara Muntai)								
1	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2200509	Dengan bertambahnya penduduk maka bertambah pula sampah yang dihasilkan, Desa Muara Leka mempunyai lahan untuk pembuangan sampah namun belum mempunyai bangunan penampungan sampah	Desa Muara Leka RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	Paranoto Perian	ID SIPD: 2322251	Harap dibuatnya TPS karena masalah sampah merusak lingkungan di desa	Perian, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan



Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Muntai)								
1	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2220337	Beberapa bagian jalan rusak dan terendam saat banjir. kondisi jembatan di jalan bahrudin rusak berat tidak bisa dilewati kendaraan dengan beban berat	Jl. Bahrudin Sebrang Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	Sofiansyah Rebaq Rinding	ID SIPD: 2318199	Jembatan yang sudah tua cenderung mengalami kerusakan struktural. risiko ambruk semakin tinggi. Jembatan yang digunakan untuk beban kendaraan yang melebihi kapasitas desain dapat mempercepat kerusakan. Erosi di sekitar jembatan yang disebabkan oleh air sungai atau cuaca ekstrem bisa merusak pondasi atau struktur jembatan. Jika jembatan dibangun dengan bahan yang tidak berkualitas atau tidak sesuai standar, kemungkinan ambruk lebih tinggi.	Jalan K.H. Agus Salim RT. 001 (Lebar 6 Meter x Panjang 25 Meter), Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	ARIFADIN NUR Muara Muntai Ilir	ID SIPD: 2018037	Ukuran Jalan 532 x 4 M, membutuhkan Infrastruktur yang memadai, merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. karena pada saat ini kondisi jalan membutuhkan perbaikan, keadaan jalan sudah tertutup dan tidak dapat di lalui. oleh karena itu kami pmdes muara muntai ilir mengajukan proposal bantuan pembukaan perbaikan jalan penghubung ke kabupaten.	Muara Muntai Ilir Seberang, dermaga dinas perhubungan, Kab. Kutai Kartanegara	500.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2031333	Kondisi jalan yang tidak layak sehingga menghambat kegiatan transportasi dan perekonomian warga sekitar terutama kegiatan warga Dusun Leka 1 Rt 07 Jalur 2	desa Muara Leka Dusun Leka 1 RT 07 Jalur 2, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan



			sepanjang 70m dan lebar 4 meter					
5	Sofiansyah Rebaq Rinding	ID SIPD: 2016114	Desa rebaq rinding masih banyak yang belum di seminisasi untuk jalannya, sehingga masih sering terjadi kerusakan pada jembatan ulin yang sering di lalui, mohon kiranya agar segera diseminisasi untuk jalan di desa rebaq rindingt khususnya di 001 sampai rt 004	Jl. K.H Agus Salim RT.001-004, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
6	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2065624	Jalan yang semenisasinya tidak layak untuk di lewati banyak yang rusak gorong gorong yang ada ambruk dan menyumbat aliran air sehingga menyebabkan banjir merupakan akses transportasi warga menuju ke kebun, TK PAUD, BPU, Mesjid, Dan Lapangan Sepak Bola	Desa MUara Leka Rt 03 Jl. Pemuda dengan Ukuran 250m x 4 m, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7	Sofiansyah Rebaq Rinding	ID SIPD: 2016097	Desa rebaq rinding masih banyak yang belum di seminisasi untuk jalannya, sehingga masih sering terjadi kerusakan pada jembatan ulin yang sering di lalui, mohon kiranya agar segera diseminisasi untuk jalan di desa rebaq rindingt khususnya di RT 05	Jl. K.H Agus Salim RT.005, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
8	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2220705	Pembangunan Badan Jalan Kayu Batu-Kuyung	Desa Kayu Batu, Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan



9	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2102898	Merupakan akses transportasi, kegiatan perekonomian warga dan mengatasi apabila warga di lingkungan sekitar ada acara sehingga jalan bisa digunakan sebagai alternatif membuka jalan akses jalan lain baik itu warga rt 2 dan warga rt 03 karena apa bila ada acara biasanya jalan utama tertutup membuat warga sukar beraktifitas	Desa Muara Leka RT 02 Menuju RT 03, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
10	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2065718	Merupakan akses warga menuju pemakaman karena jalan rusak sehingga diperlukan Semenisasi jalan kuburan non muslim untuk mempermudah kegiatan pemakaman warga non muslim di dusun leka 1 dengan volume 300 m x 4 m	Desa Muara Leka : Dusun Leka 1(Pemakaman Non Muslim), Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
11	Hardi. B Muara Leka	ID SIPD: 2031595	Belum adanya badan jalan menuju akses air bersih sehingga warga susah untuk mengambil air bersih atau pun pemeliharaan air bersih jika ada kendala air bersih sumbat	Desa Muara Leka Dusun Leka 1 RT 07 (Air bersih Benturung), Kab. Kutai Kartanegara	350.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
12	Ilhamsyah Muara Aloh	ID SIPD: 2324676	Tidak Meratanya Kontur Tanah Di Halaman Kantor Desa, Maka Dari itu Diminta Pengerukan Supaya Menjadi Rata	Desa Muara Aloh, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
13	Paranoto Perian	ID SIPD: 2322226	Perlunya disemenisasi jalan tani desa sepanjang 4 x 100 meter dikarena jalan rusak dan tidak dapat dilalui ketika hujan	PERIAN, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan lingkungan Kecamatan dan Kelurahan/Desa (Muara Muntai)								
1	Andri Shofian Dany, S.Pd Kayu Batu	ID SIPD: 2221927	4 Jalan Jembatan luah kayu batu tidak bisa di lewati angkutan berat karena mengingat kondisi jalan jembatan tersebut sudah termakan usia dan tanah di samping jembatan sering longsong terkena hujan	Jl. Bahrudin, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan



2	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2046439	Semenisasi Jalan Jembatan Gerbang Dayaku masih belum selesai	Jl. Gerbang Dayaku RT. 002 s.d. RT. 006, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Abdul Hamdi Noor Tanjung Batuq Harapan	ID SIPD: 2092497	Semenisasi Jalan Tanjung Batuq Harapan 6 x 50 Meter	Desa Tanjung Batuq Harapan, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2198072	Perlunya rehabilitasi jalan	Jl. gerbang dayaku RT. 002 Desa Muara Muntai Ulu Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
5	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2198208	Perlunya rehabilitasi jalan jembatan	Jl. gang Pepaya RT. 10 Desa Muara Muntai Ulu Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
6	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2046155	Semenisasi di Gang Kedondong baru separuh sementara sisanya masih lantai papan	Jl. Ki Hajar Dewantara RT. 010, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 1956816	Jembatan yang sudah ada masih sempit dan papannya sudah banyak yang rusak	Jl. Ki Hajar Dewantara RT. 008 s.d. RT. 012, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
8	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2044116	Selama ini jembatan masih menggunakan lantai papan yang mudah rusak dan lapuk, sementara jembatan yang ada terasa sempit	Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 006 & RT. 007, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2044575	Apabila jembatan masih menggunakan lantai papan akan dikhawatirkan cepat lapuk dan rusak	Jl. Ki Hajar Dewantara RT. 007 s.d. RT. 008, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
10	Husain, S.Pd Muara Muntai Ulu	ID SIPD: 2045880	Semenisasi Gang Kuburan masih separuh, sisanya masih memakai lantai papan	Jl. Jend. A. Yani RT. 012, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan



								Lain yang Dilimpahkan
11	Paranoto Perian	ID SIPD: 2322845	Perbaikan jalan tani RT 1 berupa semenisasi 4 x 100 meter dikarenakan jalan rusak parah dan tidak dapat dilalui ketika hujan	Perian, Kab. Kutai Kartanegara	220.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan



BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran Renja-PD

Rencana Kerja 2026 merupakan bagian dari pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi. agar tujuan dan sasaran bisa tercapai dibawah ini disajikan rumusan tabel tujuan dan sasaran beserta permasalahan yang terjadi pada Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai, yaitu :

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 2026

NO	URAIAN			
	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran
1	Belum optimalnya tertib administrasi di Kecamatan	Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap Tugas Pokok	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan
		Minimnya fasilitas (sarana dan prasarana) trantib di kecamatan untuk pelayanan ke seluruh wilayah kecamatan yang cukup luas		
2	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum efektifnya pelaksanaan musrenbang di kecamatan sebab rencana pembangunan untuk tahun depan seringkali tidak disampaikan sebelumnya kepada peserta/masyarakat		
3	Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	Belum optimalnya pembinaan aparaturnya desa dan/atau kelurahan termasuk fasilitasi pemilihan kepala desa dan BPD.		
		Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah		
4	Belum optimalnya pelayanan PATEN dan pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN		
		Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP		
5	Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Kondisi geografis antar wilayah dalam kecamatan yang berjauhan		
		Minimnya sarana dan prasarana sosial, umum, dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah		
		Minimnya data dan informasi dari desa dan atau kelurahan		
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparaturnya desa dan/atau kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial		
6	Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparaturnya kecamatan		
		Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku		
		Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani keuangan		
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparaturnya kecamatan		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 – 2026. Pada dasarnya Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan – kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut:



Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Muntai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				24.455.212.960				36.682.819.440
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Muara Muntai	76 Nilai	10.289.692.960	APBD Kutai Kartanegara		76 Nilai	15.434.539.440
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	5 Dokumen	155.000.000	APBD Kutai Kartanegara		5 Dokumen	232.500.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Muntai	4 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	4 Dokumen	15.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Muara Muntai	25 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	25 Dokumen	15.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Muara Muntai	25 Dokumen	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	25 Dokumen	11.250.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	Muara Muntai	8 Dokumen	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	8 Dokumen	15.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Muara Muntai	8 Dokumen	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	8 Dokumen	11.250.000



7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Muntai	4 Dokumen	75.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Ada kenaikan harga belanja dan target kegiatan	4 Dokumen	112.500.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Muntai	4 Dokumen	35.000.000	APBD Kutai Kartanegara	-	4 Dokumen	52.500.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Muara Muntai	75 Laporan	7.045.906.956	APBD Kutai Kartanegara		75 Laporan	10.568.860.434
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Muara Muntai	492 OB	6.935.731.014	APBD Kutai Kartanegara	Gaji dan Tunjangan ASN (Pagu Anggaran berdasarkan Nilai pagu RENSTRA 2026)	492 OB	10.403.596.521
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Muntai	1 Laporan	25.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.	1 Laporan	37.500.000
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Muara Muntai	0 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Muara Muntai	4 Dokumen	85.175.942	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.	4 Laporan	127.763.913



7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Muara Muntai	1 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara	Perlu anggaran dikarenakan perlunya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	Muara Muntai	50 Dokumen	180.256.100	APBD Kutai Kartanegara		50 Dokumen	270.384.150
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Muara Muntai	0 Laporan	150.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Masih adanya aset yang belum selesai proses pengamanannya terutama aset tanah	0 Laporan	225.000.000
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Muara Muntai	25 Laporan	30.256.100	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.	25 Laporan	45.384.150
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Dokumen	-
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Muara Muntai	11 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara		11 Dokumen	-



7.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengolahan Data Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Muara Muntai	47 Dokumen	200.000.000,00	APBD Kutai Kartanegara	47 Dokumen	300.000.000
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Unit	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Muntai	15 Stel	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	15 Stel	300.000.000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Laporan	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Laporan	-
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Laporan	-
7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Orang	-
7.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Orang	-
7.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Orang	-



7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Muntai	0 Orang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Orang	-
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Peraturan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Peraturan	-
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Bimtek	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Bimtek	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Muara Muntai	8 Layanan	765.000.000	APBD Kutai Kartanegara		8 Layanan	1.147.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Muntai	5 Jenis	15.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Penambahan Anggaran disebabkan adanya rencana rehabilitasi instalasi jaringan listrik Gedung Kantor Camat, BPU dan Rumah Dinas Jabatan Camat	5 Jenis	22.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	6 Jenis	55.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Tahun 2025 kegiatan ini dalam realisasi anggaran mengalami kekurangan anggaran. Sehingga 2026 perlu dilakukan penambahan anggaran.	6 Jenis	82.500.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Muntai	6 Jenis	-	APBD Kutai Kartanegara	Sebelumnya belum ada anggaran atas sub kegiatan	6 Jenis	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Muntai	25 Porsi	100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	25 Porsi	150.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Muara Muntai	5 Jenis	10.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	5 Jenis	15.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Muntai	5 Exemplar	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Exemplar	-
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	Muara Muntai	5 Jenis	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Jenis	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Muntai	15 Kali	85.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	15 Kali	127.500.000



7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Muntai	45 Laporan	400.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	45 Laporan	600.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Muntai	150 Dokumen	100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	150 Dokumen	150.000.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Muntai	0 Laporan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Laporan	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Muara Muntai	15 Unit	730.000.000	APBD Kutai Kartanegara		15 Unit	1.095.000.000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	1 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		1 Unit	-
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	0 Unit	180.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Sewa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)	0 Unit	270.000.000
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Muara Muntai	50 Unit	150.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Untuk kebutuhan Balai Pertemuan Umum Kec Muara Muntai	50 Unit	225.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	8 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Untuk Kebutuhan Gedung Arsip, Pelayanan KTP dan Peralatan Penunjang Administrasi pada Seksi dan Bagian	8 Unit	300.000.000
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	2 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Unit	300.000.000



7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Muara Muntai	12 Bulan	638.529.904	APBD Kutai Kartanegara		12 Bulan	957.794.856
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Muntai	1000 Materai	7.500.000	APBD Kutai Kartanegara	0	1000 Materai	11.250.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Muntai	336 Rekening	296.177.712	APBD Kutai Kartanegara	0	336 Rekening	444.266.568
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Muntai	0 Jenis	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Jenis	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Muntai	204 OB	334.852.192	APBD Kutai Kartanegara	0	204 OB	502.278.288
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Muara Muntai	2 Unit	575.000.000	APBD Kutai Kartanegara		2 Unit	862.500.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Muara Muntai	13 Unit	200.000.000	APBD Kutai Kartanegara	untuk Operasional dan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Jabatan R2 dan R4 serta perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Jabatan R2 dan R4	13 Unit	300.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Muntai	4 Unit	150.000.000	APBD Kutai Kartanegara	untuk Operasional dan Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional R2 dan Kendaraan Operasional air serta perpanjangan STNK Kendaraan Dinas operasional R2	4 Unit	225.000.000
7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-



7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Pemeliharaan AC kantor, rumah dinas jabatan, Pendopo.	0 Unit	150.000.000
7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	125.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Rehabilitasi Gedung Pendopo Kecamatan	0 Unit	187.500.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Unit	-
7.01.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Muara Muntai	0 Bidang	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Bidang	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Muara Muntai	100 Persen	12.650.000.000	APBD Kutai Kartanegara		100 Persen	18.975.000.000
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan		88,5 Persen				88,5 Persen	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Muara Muntai	5 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Kegiatan	-



7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Muara Muntai	10 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	10 Kegiatan	-
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Muara Muntai	0 Dokumen	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Dokumen	-
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Muara Muntai	25 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara	25 Kali	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Muara Muntai	0 Kali	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kali	-
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Muara Muntai	0 Unit	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Unit	-



7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Muara Muntai	36 Kegiatan	12.650.000.000	APBD Kutai Kartanegara		36 Kegiatan	18.975.000.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Muntai	7 Laporan	1.550.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Mengakomodir Pelaksanaan : 1. HKG 2. Fasilitasi HUT RI 3. Fasilitasi Hari - Hari besar keagamaan 4. Keperamukaan 5. Erau 6. MTQ 7. Keolahrahaan (Bupati CUP)	7 Laporan	2.325.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Muntai	29 Kegiatan	11.100.000.000	APBD Kutai Kartanegara	Mengakomodir Musrenbang yang di usulkan melalui SIPD.	29 Kegiatan	16.650.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Muara Muntai	95 Persen	830.000.000	APBD Kutai Kartanegara		95 Persen	1.245.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Muara Muntai	20 Kegiatan	830.000.000	APBD Kutai Kartanegara		20 Kegiatan	1.245.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Muntai	150 Orang	55.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	150 Orang	82.500.000
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-



7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	2 Kegiatan	775.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Kegiatan	1.162.500.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Muara Muntai	100 Persen	-	APBD Kutai Kartanegara		100 Persen	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	5 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		5 Kegiatan	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Muara Muntai	2 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		2 Kegiatan	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-



7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*****)	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	25 Persen	-	APBD Kutai Kartanegara	25 Persen	-
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*****)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah*****)	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Muara Muntai	10 SPM	-	APBD Kutai Kartanegara	10 SPM	-
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*****)	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*****)	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Muara Muntai	100 Persen	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara	100 Persen	75.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Muara Muntai	100 Persen	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara	100 Persen	75.000.000



7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	-
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0 Kegiatan	75.000.000



7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Muara Muntai	95 Persen	635.520.000	APBD Kutai Kartanegara		95 Persen	953.280.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Muara Muntai	13 Desa	635.520.000	APBD Kutai Kartanegara		13 Desa	953.280.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Muara Muntai	2 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		2 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	65.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	0 Kegiatan	97.500.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Muara Muntai	1 Kegiatan	306.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	1 Kegiatan	459.000.000
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-



7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Muntai	2 Kegiatan	214.520.000	APBD Kutai Kartanegara	Penambahan anggaran guna mengakomodir honorarium PPTK	2 Kegiatan	321.780.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Muntai	2 Kegiatan	50.000.000	APBD Kutai Kartanegara	0	2 Kegiatan	75.000.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Muara Muntai	2 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		2 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Muara Muntai	0 Kegiatan	-	APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Muara Muntai	0 Kegiatan		APBD Kutai Kartanegara		0 Kegiatan	-

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Muara Muntai Tahun 2022 - 2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Muntai.

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2026. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Muara Muntai.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Kecamatan Muara Muntai ini juga masih terdapat kurang - kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Kecamatan Muara Muntai Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Muara Muntai, Agustus 2025

Camat Muara Muntai



MULYADI, SE., M.Si
NIP. 19700205 200012 1 003